Andragogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam
http://riset.unisma.ac.id/index.php/ja/issue/view/696

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023
e-ISSN: 2655-948X
http://u.lipi.go.id/1548306171

PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF SOSIOLOG: META ANALISIS PENDEKATAN EMILE DUREKHEIM, MAX WEBER, GEORGE HERBERT MEAD, LOUIS ALTHUSSER, DAN IBNU KHALDUN

Fadhil Mubarak
Univesitas Islam Malang
e-mail: fadhilmubarakaisma@gmail.com

Diterima: 07 Mei 2023 | Direvisi: 19 Mei 2023 | Disetujui: 30 Mei 2023
© 2018 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstract

The problem of inequality in the distribution of education in Indonesia is the cause of obtaining quality and learning opportunities. This causes a difference in the quality of education and the chances of future success. This article aims to analyze various views of sociologists regarding the issue of educational equity, specifically by using the approach of Emile Durekheim, Max Weber, George Herbert Mead, Louis Althusser, and Ibn Khaldun. This research is a meta-analysis of social problems using approaches from various social theories. Data is taken from library sources as primary data in the form of articles from scientific journals and related books. Document analysis procedures were used in data collection. The data analysis technique uses the meta-analysis model. The process of implementing research is carried out on related documents. The results of the research show that Durkheim views that education must create social unity and form the same values throughout society. Meanwhile, Weber believes that access to education must be regulated fairly and everyone has the same opportunity to access it without the influence of economic factors. Meanwhile, Mead views that education has the ability to understand yourself and shape yourself to be able to interact with society. Louis Althusser on the other hand argues that education should be able to maintain elite power and control society. It is different with Ibn Khaldun who views that the education system must be adapted to the conditions and needs of the local community.

Keywords: *Educational Equality, Ibn Khaldun, Louis Althusser, Social Inequality*.

Abstrak

Masalah ketimpangan pemerataan pendidikan di Indonesia menjadi penyebab diperolehnya kualitas dan kesempatan belajar. Ini menyebabkan perbedaan dalam mutu pendidikan dan peluang kesuksesan di masa depan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai pandangan sosiolog terkait isu pemerataan pendidikan

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

tepatnya dengan menggunakan pendekatan Emile Durekheim, Max Weber, George Herbert Mead, Louis Althusser, dan Ibnu Khaldun. Penelitian ini adalah sebuah meta analisis terhadap permasalahan sosial dengan menggunakan pendekatan dari berbagai teori sosial. Data diambil dari sumber kepustakaan sebagai data primer berupa artikel dari jurnal ilmiah dan buku-buku terkait. Prosedur analisis dokumen digunakan dalam pengumpulan data. Teknik analisis data menggunakan model meta analisis. Proses pelaksanaan penelitian dilakukan terhadap dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Durkheim memandang bahwa pendidikan harus menciptakan persatuan sosial dan membentuk nilai yang sama di seluruh masyarakat. Sedangkan Weber percaya bahwa akses pendidikan harus diatur secara adil dan setiap orang memiliki kesempatan sama untuk mengaksesnya tanpa pengaruh faktor ekonomi. Sementara itu, Mead memandang bahwa pendidikan memliki kemampuan memahami diri sendiri dan membentuk diri mampu berinteraksi dengan masyarakat . Louis Althusser di sisi lain berpendapat pendidikan seharusnya mampu menjaga kekuasaan elit dan mengontrol masyarakat. Lain halnya dengan Ibnu Khaldun yang memandang bahwa sistem pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Ibnu Khaldun, Kesenjangan Sosial, Louis Althusser, Pemerataan Pendidikan.*

Pendahuluan

Masalah ketimpangan pemerataan pendidikan di Indonesia adalah isu yang kompleks dan memengaruhi banyak sektor kehidupan di negara ini (Anwar, 2022; Yuliani, 2013). Salah satu masalah utama adalah aksesibilitas pendidikan yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau besar dan kecil. Daerah terpencil, terisolasi, atau konflik sering mengalami kesulitan dalam menyediakan akses pendidikan yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam kesempatan belajar dan kualitas pendidikan. Kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai juga menjadi masalah yang signifikan. Banyak sekolah di daerah terpencil atau miskin tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti gedung sekolah yang layak, laboratorium, perpustakaan, dan akses ke teknologi informasi. Kurangnya infrastruktur yang memadai ini dapat menghambat proses pembelajaran dan menurunkan kualitas pendidikan (Muqsith, 2020; Yusdiana, 2018).

Ketimpangan seperti ini terlihat dalam kualitas pendidikan yang diberikan di berbagai daerah. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan biasanya memiliki sumber daya yang lebih baik, guru yang berkualitas, dan kurikulum yang lebih lengkap dibandingkan dengan sekolah di daerah pedesaan. Ini menyebabkan perbedaan

dalam mutu pendidikan dan peluang kesuksesan di masa depan. Disparitas pendanaan antara daerah kaya dan miskin juga berperan dalam ketimpangan pemerataan pendidikan. Beberapa daerah mungkin memiliki akses ke sumber daya yang lebih besar untuk menginvestasikan dalam pendidikan, sementara daerah lain mungkin kesulitan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam fasilitas, program, dan kualitas pengajaran (Hulu & Wahyuni, 2021; Karmila dkk., 2020; Rahmawati, 2022).

Berdasarkan latar masalah di atas, pemerataan akses pendidikan adalah hal penting demi kemajuan masyarakat dan negara. Setiap individu berhak mendapatkan akses pendidikan yang sama, tanpa memandang latar belakang sosial, agama, atau kekayaan. Pemerataan akses pendidikan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, dan mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci utama dalam pembangunan masyarakat dan negara. Pemerataan pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pemuda dan pemudi untuk mengembangkan keahlian dan potensi diri sehingga dapat membangun masyarakat yang lebih maju (Arkorful dkk., 2019; Coombs, 2006).

Selain itu, pendidikan merupakan salah satu upaya paling efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan memberikan akses pendidikan yang sama, maka kesenjangan sosial dapat dihilangkan atau dikurangi. Selain itu, pendidikan juga dapat memberikan kemampuan kepada seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup. Pendidikan memperluas wawasan dan pengetahuan seseorang sehingga mampu bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Dengan pendidikan yang berkualitas, individu dapat menjadi lebih produktif dalam menghasilkan karya dan menciptakan inovasi yang berguna bagi kemajuan masyarakat dan negara (Lubis dkk., 2022; Maula dkk., 2023; Syafii, 2018; Wijana & Suhardi, 2018).

Fakta bahwa masih ada ketidakmerataan akses pendidikan di Indonesia adalah nyata. Hal itu dapat diindikasi dari kurangnya sarana pendidikan di daerah terpencil, biaya pendidikan yang mahal, dan kurangnya perhatian terhadap pendidikan pada anak-anak miskin dan anak perempuan, meskipun, tak dapat dipungkiri, pemerintah Indonesia telah dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di seluruh negeri. Hal itu membuat isu pemerataan pendidikan di Indonesia bukanlah hal baru (Hakim, 2016; Nanggala, 2020).

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan sebuah meta analisis tentang bagaimana pandangan sosiolog terkait isu pemerataan pendidikan dengan menggunakan berbagai pendekatan dan teori sosial beserta implikasinya. Artikel ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial dan juga sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan terutama dalam bidang pendidikan.

Kajian Teori

1. Emile Durekheim (Teori Solidaritas Sosial)

Durkheim memandang solidaritas sosial sebagai suatu sistem yang mempersatukan individu-individu dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang heterogen, solidaritas sosial dibentuk melalui perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu, seperti perbedaan dalam pekerjaan atau status sosial. Durkheim memandang fakta sosial sebagai sesuatu yang lebih besar dari individu dan tidak dapat dikendalikan oleh individu. Fakta sosial mencakup norma-norma, kepercayaan, dan nilai-nilai dalam masyarakat, serta praktik-praktik dan institusi-institusi sosial yang ada di dalamnya (Durkheim, 1922; Martono, 2012).

2. Max Weber (Teori Tindakan Sosial)

Teori tindakan sosial Max Weber berfokus pada konsep tindakan sosial sebagai dasar dari segala bentuk interaksi sosial. Menurut Weber, tindakan sosial terkait dengan tujuan atau arti tertentu yang terkait dengan motivasi niat individu dalam melakukan tindakan tersebut. Konsep tindakan sosial Weber dibagi menjadi empat kategori yaitu: 1) Tindakan rasional terhadap tujuan (Zweckrational) adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan yang terarah dan diukur sesuai dengan hasil yang diharapkan. Contohnya adalah sistematis dan metodikal dalam mencapai suatu tujuan. 2) Tindakan rasional sesuai dengan nilai atau moral (Wertrational) adalah tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika. Contohnya adalah tindakan yang dilakukan dengan standar ataupun nilai baik, lapang dada, dan menolak korupsi. 3) Tindakan afektif atau tindakan emosional (Affectual) adalah tindakan yang dilakukan oleh individu berdasarkan kondisi emosional yang terjadi pada kondisi dan situasi tertentu. Contohnya adalah orang yang mengalami frustasi dan kemudian melakukan tindakan impulsif. 4) Tindakan tradisional (Traditional) adalah tindakan yang dilakukan secara terus menerus mengikuti aturan yang sudah ada dan menjadi kebiasaan dari generasi ke generasi. Contohnya adalah melakukan tindakan yang didasarkan pada tradisi atau adat istiadat yang sudah menjadi bagian dari budaya (E. C. A. Fauzi, 2022; Weber, 2013).

3. George Herbert Mead (Teori Interaksi Simbolik)

George Herbert Mead adalah sosialis Amerika yang paling terkenal dengan teori Interaksi Simbolik. Dia adalah seorang filsuf sosial, psikolog sosial, dan teoritikus linguistik. Teori Mead tentang Interaksi Simbolik adalah landasan teori dalam disiplin ilmu sosiologi, psikologi, dan antropologi. Menurut Mead, manusia terlahir tanpa identitas sosial atau konsep diri, dan bahwa identitas sosial dan konsep diri biasanya berkembang melalui proses interaksi sosial yang kompleks. Pandangan Mead tentang sifat manusia adalah bahwa manusia terlahir dengan kemampuan untuk bekerja sama, memahami satu sama lain, dan merespon lingkungan sosial-nya (Arifal, 2020; Hikmah, 2017; Virginia, 2022). Teori Interaksi Simbolik Mead didasarkan pada tiga prinsip dasar, yaitu: 1) Tindakan manusia dibentuk melalui interaksi sosial, 2) Arti simbolik membentuk perilaku, dan 3) Proses sosialisasi melibatkan pergantian peran (Arbangi & Umiarso, 2022).

4. Louis Althusser (Teori Interpelasi Ideologi)

Louis Althusser dikenal sebagai tokoh sosial yang lebih cenderung ke arah apratus ideologis dari pada aparatus represif. Teori Interpelasi Ideologi Louis Althusser adalah suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu diterjemahkan atau disiplin oleh ideologi melalui proses sosialisasi dari suatu masyarakat. Menurut Althusser, individu bukanlah entitas yang bebas (Isa Anshori, 2016; Setiyawan & Budiman, 2019). Mereka sebaliknya selalu berada dalam suatu hubungan yang struktural dengan negara dan kekuasaan. Oleh karena itu, individu selalu diinterpelasi oleh ideologi yang melekat dalam masyarakat, termasuk dalam kebijakan, media, tradisi, bahasa, dan budaya. Interpelasi itu sendiri adalah suatu proses yang memungkinkan individu menerima ideologi yang dihadapinya, bahkan tanpa menyadarinya (Althusser, 2015).

Dalam konteks ini, individu diberitahu bahwa mereka memiliki peran tertentu dalam masyarakat dan diminta untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat. Althusser berpendapat bahwa over-determination (hubungan atau entitas yang saling ketergantungan) antara individu dan ideologi terjadi pada berbagai tingkat organisasi sosial yang lebih luas. Proses sosialisasi selalu memperkuat hubungan ini, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap individu yang patuh dan berperan sesuai dengan tuntutan sosial. Dapat disimpulkan bahwa teori Interpelasi Ideologi Louis Althusser menjelaskan bahwa individu selalu dipandu oleh ideologi di sekeliling mereka, baik yang disadari maupun tidak disadari, dan peran sosialisasi sangat penting dalam menentukan peran dan perilaku mereka dalam masyarakat. Ideologi yang kuat dan mendominasi selalu berpotensi untuk mengekang kebebasan individu dan sering kali melekat dalam kebiasaan, tradisi, tata cara, dan nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat.

5. Ibnu Khaldun (Teori Ashabiyah)

Teori Ashabiyah atau semangat kebersamaan kelompok adalah teori yang dicetuskan oleh Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan Muslim abad ke-14 dari Tunisia. Teori ini mengemukakan bahwa kelompok-kelompok manusia atau masyarakat terbentuk berdasarkan nilai-nilai dan semangat kebersamaan yang sama. Menurut Ibnu Khaldun, semangat kebersamaan yang kuat dalam sebuah kelompok dapat memperkuat persatuan dan kekuatan mereka dalam menghadapi tantangan dari luar. Namun, semangat kebersamaan yang berlebihan juga dapat memicu konflik antara kelompok yang berbeda (A. Fauzi dkk., 2022; Nasution, 2020; Nur 'Afifah, 2012).

Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa ada empat tahap perkembangan masyarakat, yaitu: 1) Tahap kebersamaan - masyarakat awal yang diwarnai oleh semangat kebersamaan yang tinggi. 2) Tahap penguasaan - masyarakat mulai membentuk pemerintahan untuk mengatur dan mengendalikan kelompok-kelompok. 3) Tahap kemunduran - masyarakat mulai menurun karena kemerosotan moral dan semangat kebersamaan yang hilang. 4) Tahap kehancuran - masyarakat mengalami kehancuran karena tidak mampu mengatasi perpecahan dan konflik dalam kelompok-kelompok yang ada (Khaldun, 2000; Safarnaa, 2022; Sari, 2021).

Metode

Penelitian ini merupakan sebuah meta-analisis yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan sosial dengan pendekatan berbagai teori sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber kepustakaan, seperti artikel jurnal ilmiah dan buku-buku yang relevan, yang merupakan data primer. Proses pengumpulan data dilakukan melalui prosedur analisis dokumen, di mana peneliti mengumpulkan dan mengidentifikasi dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan sosial yang diteliti. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan temuan-temuan penting yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang sedang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model meta-analisis. Model ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai studi sebelumnya yang telah dilakukan tentang permasalahan sosial yang sama. Dengan menggunakan teknik meta-analisis, peneliti dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang berbeda, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang permasalahan sosial yang sedang diteliti. Proses pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait permasalahan sosial yang diteliti.

Kemudian, peneliti menganalisis dokumen-dokumen tersebut menggunakan teknik meta-analisis untuk mengidentifikasi temuan utama dan mengintegrasikannya menjadi satu kesimpulan yang lebih luas. Hasil penelitian kemudian dilaporkan dalam bentuk artikel ilmiah yang sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, dengan menggunakan pendekatan meta-analisis, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang permasalahan sosial yang diteliti, dengan mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai studi sebelumnya. Kedua, penggunaan sumber kepustakaan sebagai data primer memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengakses dan menganalisis data yang relevan secara luas. Ketiga, menggunakan prosedur analisis dokumen memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan pengetahuan yang telah ada dan mengidentifikasi tema-tema utama dengan cepat. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, karena mengandalkan data dari sumber kepustakaan, penelitian ini mungkin terbatas pada data yang tersedia dan mungkin tidak mencakup semua aspek permasalahan sosial yang relevan. Kedua, karena penggunaan data sekunder, penelitian ini tidak dapat mengontrol variabel-variabel yang ada dalam studi asli. Ketiga, penelitian ini mungkin terbatas pada analisis yang hanya bersifat deskriptif dan tidak dapat memberikan penjelasan mendalam tentang hubungan sebab-akibat.

Hasil dan Pembahasan

Teori solidaritas sosial Emile Durkheim adalah tentang bagaimana masyarakat terorganisir melalui hubungan dan persatuan sosial. Dalam teori ini, Durkheim membedakan antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik adalah jenis solidaritas yang ditemukan dalam masyarakat tradisional yang memiliki struktur sosial yang sederhana. Solidaritas mekanik didasarkan pada kesamaan di tingkat moral dan sosial masyarakat. Sedangkan, solidaritas organik terjadi dalam masyarakat modern yang kompleks, di mana warga bergantung pada satu sama lain untuk bertahan hidup (Ottaway, 1955).

Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim memberikan gagasan bahwa akses pendidikan harus diberikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini untuk memastikan solidaritas sosial dalam masyarakat yang kompleks. Menurut Durkheim, kesenjangan dalam pemerataan akses pendidikan dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakbersamaan dalam masyarakat. Hal ini dapat memengaruhi solidaritas sosial dan mengganggu hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, pemerataan akses pendidikan harus menjadi perhatian utama bagi masyarakat modern. Dalam konteks yang lebih luas, pemerataan akses pendidikan

juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang tujuan sosial dan membantu mereka memahami kepentingan bersama dalam masyarakat. Dengan demikian, pemerataan akses pendidikan dapat memperkuat masalah sosial dan mempromosikan solidaritas sosial yang lebih kuat di antara anggota masyarakat (Durkheim, 1973).

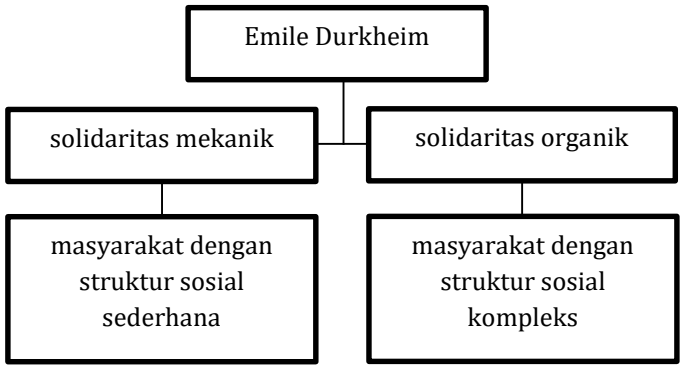

Gambar 1. Alur Teori Solidaritas Sosial Durkheim

Menurut peneliti, Teori Solidaritas Sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dapat memberikan wawasan yang berguna dalam memahami hubungan antara pendidikan Islam dan solidaritas sosial. Durkheim mengemukakan bahwa solidaritas sosial adalah ikatan sosial yang menghubungkan individu-individu dalam masyarakat. Solidaritas sosial dapat terbentuk melalui kesamaan nilai-nilai, norma-norma, dan tujuan bersama yang diadopsi oleh individu dalam masyarakat. Pendekatan Durkheim terhadap solidaritas sosial terbagi menjadi dua jenis, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Solidaritas mekanis terjadi dalam masyarakat yang didasarkan pada kesamaan dan ketergantungan kolektif, di mana individu-individu memiliki nilai-nilai, norma-norma, dan peran sosial yang sama. Sementara itu, solidaritas organik terjadi dalam masyarakat yang beragam dan kompleks, di mana individu-individu saling bergantung dalam melakukan berbagai peran dan spesialisasi.

Ketika diterapkan dalam konteks pendidikan Islam, teori solidaritas sosial Durkheim dapat memberikan beberapa pemahaman penting. Pendidikan Islam memiliki peran yang signifikan dalam membentuk solidaritas sosial dalam komunitas Muslim. Melalui pendidikan Islam, individu-individu belajar nilai-nilai agama, norma-norma, dan ajaran Islam yang dapat menjadi dasar pembentukan kesatuan dan solidaritas sosial. Pendidikan Islam juga dapat membantu membangun solidaritas mekanis dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, pendidikan Islam mengajarkan ajaran-ajaran yang menguatkan rasa persatuan dan kesamaan antara individu-individu Muslim. Misalnya, nilai-nilai seperti tolong-

menolong, saling menghormati, dan keadilan yang diajarkan dalam Islam dapat membentuk ikatan sosial yang kuat antara individu-individu dalam masyarakat Muslim. Selain itu, pendidikan Islam juga dapat memainkan peran penting dalam membangun solidaritas organik dalam masyarakat Muslim. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan nilai-nilai dan ajaran agama, tetapi juga memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang kompleks. Melalui pendidikan Islam, individu-individu dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat, serta belajar untuk saling bergantung dan bekerja sama dalam berbagai peran dan spesialisasi yang berbeda. Namun, penting untuk diingat bahwa pendidikan Islam tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya faktor yang membentuk solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim. Ada berbagai faktor lain, seperti budaya, ekonomi, dan politik, yang juga berperan dalam membentuk solidaritas sosial. Selain itu, solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim juga harus mencakup dan menghormati keragaman yang ada, baik dalam pemahaman agama maupun dalam aspek-aspek sosial dan budaya.

Lain halnya dengan Max Weber, Teori Tindakan Sosialnya menghubungkan tindakan sosial dengan struktur sosial. Max Weber berpendapat bahwa tindakan sosial adalah hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya yang terbentuk oleh struktur sosial. Dalam konteks pemerataan akses pendidikan, teori ini dapat dihubungkan dengan peran struktur sosial dalam menentukan akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat. Struktur sosial yang ada dalam sistem pendidikan akan mempengaruhi tindakan sosial individu dalam memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka (Prahesti, 2021; Weber, 2013).

Max Weber juga menyoroti pentingnya keterampilan dan keahlian individu dalam menentukan akses dan kesempatan pendidikan. Hal ini berarti, individu yang memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan dalam sistem pendidikan akan memperoleh akses dan kesempatan pendidikan yang lebih baik. Namun, di sisi lain, struktur sosial yang tidak merata dan ketidakadilan dalam sistem pendidikan dapat membatasi akses dan kesempatan pendidikan bagi individu yang berasal dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial dalam akses dan kesempatan pendidikan yang berdampak pada meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi ketidakadilan dan kesenjangan sosial dalam sistem pendidikan. Upaya ini meliputi pemberian akses yang sama bagi setiap individu, pemenuhan

kebutuhan individu, dan penghilangan diskriminasi yang berdasarkan faktor sosial seperti pendidikan, ekonomi, maupun budaya (Khaidir dkk., 2022).

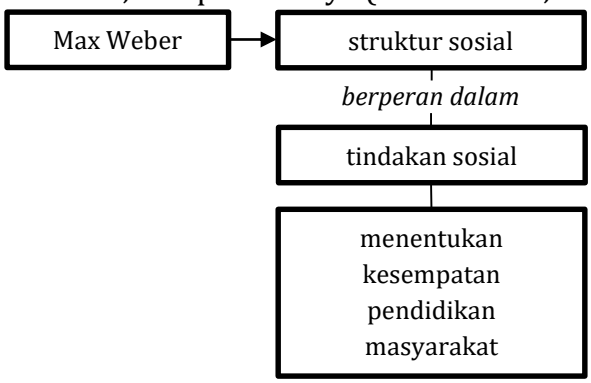

Gambar 2. Implikasi Teori Tindakan Sosial Max Weber terhadap akses pendidikan

Berdasarkan paparan tersebut, menurut peneliti, Teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam memahami hubungan antara pendidikan Islam dan tindakan sosial. Weber berpendapat bahwa tindakan sosial dipengaruhi oleh motivasi dan makna subjektif yang diberikan oleh individu terhadap tindakan tersebut. Dalam konteks pendidikan Islam, teori tindakan sosial Weber dapat digunakan untuk memahami bagaimana individu-Islam berinteraksi dengan pendidikan Islam dan bagaimana tindakan tersebut membentuk masyarakat Muslim secara keseluruhan. Individu-Islam dapat memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda dalam mencari pendidikan Islam, seperti pengetahuan agama yang lebih mendalam, pemahaman spiritual, atau pengembangan moral.

Weber juga mengemukakan konsep penting lainnya, yaitu rasionalitas tindakan sosial. Ada dua bentuk rasionalitas tindakan sosial yang relevan dalam konteks pendidikan Islam, yaitu rasionalitas nilai (value rationality) dan rasionalitas instrumental (instrumental rationality). Rasionalitas nilai berkaitan dengan tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai, keyakinan, atau prinsip agama yang diyakini individu-Islam. Sedangkan rasionalitas instrumental berkaitan dengan tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan praktis atau kemanfaatan. Dalam pendidikan Islam, individu-Islam dapat menjalankan tindakan sosial yang didasarkan pada rasionalitas nilai, yaitu tindakan yang dilakukan dengan alasan nilai-nilai agama yang diyakini. Misalnya, individu-Islam dapat mencari pendidikan Islam untuk mendalami pemahaman tentang ajaran agama, untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, atau untuk memperoleh keberkahan dalam kehidupan mereka.

Di sisi lain, rasionalitas instrumental juga memainkan peran penting dalam pendidikan Islam. Individu-Islam mungkin juga mencari pendidikan Islam dengan alasan praktis, seperti meningkatkan peluang kerja, mengembangkan keterampilan sosial, atau memperoleh pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun motivasi ini dapat bervariasi antara individu, rasionalitas instrumental tetap merupakan faktor yang memengaruhi tindakan sosial dalam mencari pendidikan Islam. Penting untuk diingat bahwa pendidikan Islam bukanlah satu entitas tunggal dengan tujuan dan makna yang sama bagi semua individu-Islam. Individu-Islam memiliki kebebasan dan keberagaman dalam memahami dan menjalankan pendidikan Islam sesuai dengan konteks dan situasi mereka. Oleh karena itu, dalam menganalisis hubungan antara teori tindakan sosial Weber dan pendidikan Islam, perlu diakui bahwa tindakan sosial dapat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor individual, sosial, dan budaya yang kompleks.

Adapun George Herbert Mead, ia menjelaskan tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap individu dan bagaimana individu memahami dan memberikan makna pada simbol-simbol dalam lingkungan tersebut. Teori Interaksi Simboliknya mengasumsikan bahwa individu melihat dirinya dari sudut pandang orang lain dan menentukan perilakunya berdasarkan pada persepsi mereka tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Teori ini dapat diaplikasikan dalam cara individu memahami makna dan nilai-nilai yang terkait dengan pendidikan. Misalnya, individu dari kelompok sosial yang kurang mampu cenderung menganggap pendidikan sebagai suatu yang tidak penting atau sulit dicapai karena terkendala akses dan biaya pendidikan yang tinggi. Sementara itu, individu dari kelompok sosial yang lebih mapan memiliki persepsi yang berbeda tentang pendidikan dan lebih mudah untuk mengaksesnya (Arbangi & Umiarso, 2022; Blumer, 1966).

Melalui pendekatan Interaksi Simbolik, pemerataan akses pendidikan dapat dilakukan dengan cara memperkuat persepsi individu dari kelompok sosial yang kurang mampu tentang pentingnya pendidikan dalam mencapai tujuan hidup masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan serta menumbuhkan keyakinan bahwa pendidikan dapat membuka pintu keberhasilan dan meraih cita-cita, sehingga individu dari kelompok sosial tersebut mampu memberikan makna yang positif terhadap pendidikan. Selain itu, pemerataan akses pendidikan juga dapat dilakukan dengan cara memberikan akses dan kemudahan dalam memperoleh pendidikan bagi seluruh individu tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan

bantuan finansial atau beasiswa bagi individu yang kurang mampu untuk dapat mengakses pendidikan yang layak.

Secara keseluruhan, Teori Interaksi Simbolik George Herbert Mead dapat menjadi dasar dalam melihat dan memahami pengaruh lingkungan sosial terhadap persepsi dan tindakan individu dalam hal pemerataan akses pendidikan. Dengan memahami pentingnya pendidikan dan memberikan kemudahan akses bagi seluruh individu, diharapkan dapat terwujud pemerataan pendidikan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

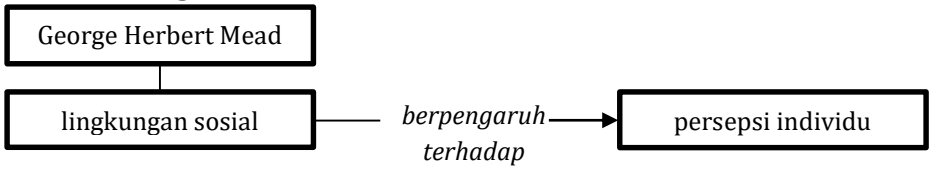

Gambar 3. Alur Teori Interaksi Simbolik George Herbert Mead terhadap persepsi sosial yang berpengaruh pada akses pendidikan masyarakat

Menurut peneliti, Teori dari Mead ini dapat memberikan pemahaman yang berharga dalam menganalisis hubungan antara pendidikan Islam dan interaksi sosial dalam masyarakat Muslim. Teori ini menekankan pentingnya simbol dan interaksi sosial dalam pembentukan makna dan pemahaman individu terhadap dunia sekitarnya. Dalam konteks pendidikan Islam, teori interaksi simbolik dapat digunakan untuk memahami bagaimana individu-Islam memperoleh dan memahami makna ajaran Islam melalui interaksi sosial. Menurut Mead, individu-Islam tidak hanya menerima makna ajaran Islam secara pasif, tetapi mereka juga aktif berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka untuk memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai, norma-norma, dan praktik Islam. Pendidikan Islam sebagai sebuah proses interaktif melibatkan guru, sesama siswa, dan lingkungan sosial lainnya. Melalui interaksi dengan guru dan sesama siswa, individu-Islam belajar tentang konsep-konsep agama, ritual, moralitas, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam. Mereka juga berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas seperti diskusi kelompok, permainan peran, atau praktik ibadah yang memberikan kesempatan untuk mempraktikkan dan memahami ajaran Islam dengan lebih baik.

Selain itu, teori interaksi simbolik juga menyoroti pentingnya penggunaan simbol dalam pendidikan Islam. Simbol-simbol, seperti teks agama, doa, ayat Al-Quran, atau lambang-lambang agama, memiliki makna dan representasi khusus dalam konteks agama. Melalui interaksi dengan simbol-simbol ini, individu-Islam memperoleh pemahaman tentang ajaran Islam dan membentuk identitas mereka sebagai individu-Islam yang aktif dan berpartisipasi dalam komunitas Muslim. Selain itu, teori interaksi simbolik juga menekankan pentingnya proses sosialisasi

dalam pendidikan Islam. Sosialisasi mengacu pada proses di mana individu-Islam belajar dan menginternalisasi norma-norma, nilai-nilai, dan tindakan yang diharapkan dalam masyarakat Muslim. Melalui pendidikan Islam, individu-Islam diperkenalkan pada norma-norma dan aturan-aturan agama, serta belajar bagaimana berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa teori interaksi simbolik Mead juga menekankan pada peran aktif individu dalam membangun makna melalui proses interaksi. Oleh karena itu, pemahaman dan interpretasi individu-Islam terhadap ajaran Islam dapat bervariasi berdasarkan pengalaman, latar belakang, dan konteks sosial mereka. Selain itu, individu-Islam juga dapat berpartisipasi dalam interaksi sosial di luar lingkungan pendidikan formal, seperti keluarga, teman sebaya, atau masyarakat Muslim yang lebih luas, yang juga berkontribusi pada pemahaman mereka tentang ajaran Islam.

Kemudian ada Teori Interpelasi Ideologi dari Louis Althusser yang menjelaskan bagaimana kekuasaan dan ideologi bekerja bersamaan untuk menciptakan masyarakat yang pasif dan patuh. Althusser menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya berada di tangan para pemimpin politik atau elit ekonomi, melainkan juga terletak dalam budaya dan struktur sosial yang membentuk cara kita memikirkan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita (Ferretter, 2007; Hemalatha, 2019; Romadona, 2020).

Dalam hubungannya dengan pemerataan akses pendidikan, teori ini mengatakan bahwa ideologi yang dibangun oleh struktur sosial seperti kekuasaan, etnis, ekonomi, dan agama dapat mempengaruhi akses ke pendidikan. Ideologi tersebut membentuk pandangan dan pandangan-pandangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan dalam mencari pendidikan. Misalnya, jika seseorang menganggap bahwa pendidikan hanya bisa dicapai oleh mereka yang memiliki uang banyak, maka ia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan karena faktor ekonomi.

Namun, teori ini juga mengatakan bahwa tidak semua orang akan dipengaruhi oleh ideologi yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, individu harus mampu menciptakan dirinya sendiri dan tidak hanya dipengaruhi oleh ideologi yang mendukung struktur sosial. Seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk memperoleh pendidikan, meskipun ia berasal dari kelompok yang kurang mampu, dapat mencapainya dengan membuka dirinya terhadap peluang yang tersedia dan menempuh jalannya dengan tekad dan usaha keras. Oleh karena itu, pemerataan akses pendidikan dapat diwujudkan melalui kemampuan individu untuk melampaui pengaruh ideologi dan memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk memperoleh pendidikan.

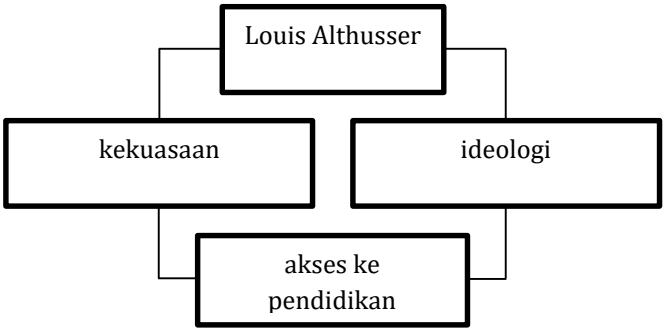

Gambar 4. Hubungan kekuasaan dan ideologi masyarakat terhadap akses pendidikan menurut Louis Althusser

Menurut peneliti, Teori Interpelasi Ideologi yang dikemukakan oleh Louis Althusser dapat memberikan wawasan penting dalam memahami akses pemerataan pendidikan Islam. Althusser berpendapat bahwa melalui institusi-institusi sosial seperti sekolah, individu-individu disosialisasikan dan diinterpelasi untuk mengadopsi ideologi yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan Islam, teori Interpelasi Ideologi dapat membantu menjelaskan bagaimana akses pemerataan pendidikan Islam dapat dipengaruhi oleh ideologi-ideologi yang ada dalam masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat yang menganut ideologi yang tidak memprioritaskan atau bahkan mengeksploitasi agama Islam, akses pemerataan pendidikan Islam mungkin terbatas atau terhalang. Interpelasi ideologi terjadi melalui berbagai mekanisme dalam sistem pendidikan, termasuk kurikulum, metode pengajaran, serta norma dan nilai yang ditanamkan dalam proses pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, jika ideologi yang mendukung kesetaraan akses dan pemerataan pendidikan Islam tidak diadopsi oleh institusi-institusi pendidikan, maka akses pemerataan pendidikan Islam dapat terhambat.

Selain itu, dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan politik yang dapat mempengaruhi akses pemerataan pendidikan Islam. Misalnya, ketimpangan ekonomi, infrastruktur yang tidak memadai, dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya pendidikan dapat menjadi hambatan bagi akses pemerataan pendidikan Islam di beberapa wilayah. Selain itu, teori Interpelasi Ideologi juga dapat mengarahkan perhatian kita pada peran penting lembaga-lembaga keagamaan dalam memfasilitasi akses pemerataan pendidikan Islam. Lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam lainnya memiliki peran yang krusial dalam menyediakan pendidikan Islam kepada individu-Islam. Namun, penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut juga menerapkan prinsip-

prinsip pemerataan akses dan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh masyarakat Muslim.

Untuk mewujudkan akses pemerataan pendidikan Islam yang lebih adil, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah dapat mendorong kebijakan yang mendukung akses pemerataan pendidikan Islam, seperti pemberian subsidi atau beasiswa untuk pendidikan Islam, peningkatan infrastruktur pendidikan Islam di daerah terpencil, dan pengembangan kurikulum yang inklusif dan relevan. Selain itu, masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam memperjuangkan akses pemerataan pendidikan Islam. Masyarakat dapat mengorganisir komunitas lokal untuk mengadvokasi hak pendidikan Islam, berpartisipasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam, dan mendukung program-program pendidikan.

Adapun Ibnu Khaldun, sebagai seorang filosof dan sejarawan yang hidup pada abad ke-14, memberikan pandangannya tentang pemerataan akses pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, pemerataan akses pendidikan memiliki implikasi yang sangat penting bagi keberhasilan sebuah masyarakat. Ibnu Khaldun menyadari bahwa pendidikan adalah kunci penting bagi kemajuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Namun, ia juga menyadari bahwa tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Ia berpendapat bahwa masyarakat harus memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas (Nasution, 2020).

Menurut Ibnu Khaldun, pemerataan akses pendidikan dapat dicapai melalui beberapa cara. Salah satu cara adalah dengan memberikan pendidikan gratis atau subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Selain itu, masyarakat juga harus mengembangkan sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan individu dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mendapatkannya. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menyadari pentingnya motivasi dalam mendapatkan pendidikan. Ia berpendapat bahwa pemerataan akses pendidikan harus disertai dengan dorongan motivasi yang kuat bagi individu untuk belajar dan berkembang. Ini dapat dicapai melalui pembangunan nilai-nilai yang menghargai pendidikan dan mengubah pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Semua ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun sangat peduli dengan isu pemerataan akses pendidikan dan menganggapnya sebagai kunci penting bagi kemajuan masyarakat. Pendapatnya tentang hal ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi upaya-upaya pemerataan akses pendidikan di berbagai belahan dunia (Komarudin, 2022).

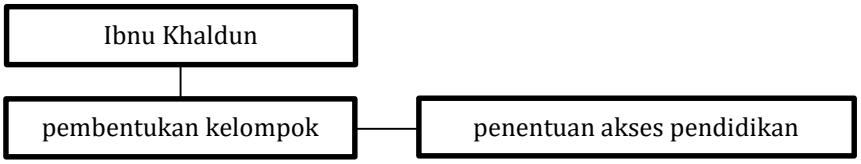

Gambar 5. Peran signifikan *Ashabiyah* (kelompok) terhadap penentuan akses pendidikan

Ibnu Khaldun menemukan Teori Ashabiyah, suatu teori tentang solidaritas sosial yang lahir pada abad ke-14. Teori ini mengatakan bahwa manusia cenderung membentuk kelompok atau asosiasi untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam hubungannya dengan pemerataan akses pendidikan, teori ini dapat diaplikasikan sebagai berikut:

1. Solidaritas antaranggota kelompok dapat meningkatkan akses pendidikan. Dalam kelompok yang solid, anggota saling menguatkan dan membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan yang sama. Misalnya, kelompok belajar yang terdiri dari anak-anak dari keluarga miskin dapat membantu mereka untuk memperoleh pelajaran yang sama dengan anak-anak keluarga yang lebih mampu.
2. Kelompok yang solid dapat menjembatani kesenjangan pendidikan. Kelompok-kelompok yang terbentuk dari berbagai latar belakang, termasuk sosial dan ekonomi, dapat memungkinkan pertukaran pengalaman dan pengetahuan yang dapat meningkatkan akses pendidikan antara anggotanya. Misalnya, anak-anak yang berasal dari keluarga petani dapat belajar dari anak-anak dari keluarga tani yang lebih maju dan memiliki pengetahuan lebih tentang pertanian.
3. Ashabiyah (semangat kelompok) dapat menjadi dasar bagi pemerataan pendidikan. Jika kelompok masyarakat memiliki semangat yang kuat untuk memajukan pendidikan, maka pendidikan akan menjadi lebih merata di antara anggotanya. Misalnya, jika suatu kelompok memiliki semangat tinggi untuk meningkatkan pendidikan anak-anak di daerah mereka, maka pendidikan di daerah tersebut akan meningkat secara signifikan (Khaldun, 2000; Nurandriani & Alghazal, 2022; Thalib, 2020; Wajdi, 2015; Zahirwan dkk., 2017).

Menurut peneliti, implikasi dari teori ini menyiratkan bahwa untuk dapat membantu meningkatkan pemerataan akses pendidikan, solidaritas sosial dalam kelompok-kelompok masyarakat yang beragam harus dibangun, dan peningkatan dan pertukaran pengetahuan antara anggota kelompok harus dimungkinkan demi mencapai tujuan bersama. Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan Muslim terkenal dari abad ke-14, tidak secara spesifik membahas akses pemerataan pendidikan

Islam dalam karya-karyanya. Namun, konsep-konsep yang dikemukakannya dapat memberikan wawasan tentang pandangannya terhadap pendidikan dan masyarakat Muslim pada zamannya. Ibnu Khaldun mengembangkan teori siklus sejarah yang melibatkan dinamika peradaban manusia, yang disebut "Muqaddimah" atau "Pendahuluan". Dalam karyanya, ia menyoroti pentingnya pendidikan dalam pembentukan dan keberlanjutan sebuah peradaban. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan memiliki peran krusial dalam mengembangkan potensi manusia, membangun kemampuan intelektual, dan mempersiapkan individu untuk berperan dalam masyarakat.

Ibnu Khaldun juga mengakui bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka. Dia mengemukakan gagasan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi monopoli kelompok elit atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Sebaliknya, pendidikan harus tersedia dan dapat diakses oleh semua individu, sehingga memungkinkan potensi dan bakat setiap orang untuk berkembang. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, ketimpangan dalam akses pendidikan dapat menjadi faktor yang menghambat perkembangan masyarakat dan menyebabkan penurunan peradaban. Jika hanya segelintir orang atau kelompok kecil yang memiliki akses terhadap pendidikan, ini dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendorong agar pendidikan Islam menjadi hak universal bagi semua anggota masyarakat Muslim. Dia mengakui pentingnya pembentukan masyarakat yang berpengetahuan dan menganggap pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan sosial. Meskipun Ibnu Khaldun tidak secara eksplisit membahas akses pemerataan pendidikan Islam, pandangannya tentang pentingnya pendidikan yang merata dan universal dalam membangun masyarakat yang maju dan berkeadilan dapat diterapkan dalam konteks pendidikan Islam. Konsep-konsep yang dikemukakannya mendorong kita untuk memperjuangkan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh komunitas Muslim, sehingga memungkinkan potensi dan bakat setiap individu untuk berkembang secara optimal, serta mendorong kemajuan sosial dan intelektual umat Islam secara keseluruhan.

Perbedaan perspektif antara lima tokoh yang disebutkan tampak jelas. Durkheim memandang bahwa pendidikan harus menciptakan persatuan sosial dan membentuk nilai-nilai yang sama di seluruh masyarakat. Namun, ia tidak terlalu fokus pada pemerataan akses pendidikan karena menurutnya, setiap masyarakat memiliki kecenderungan untuk mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka. Sedangkan Weber percaya bahwa

akses pendidikan harus diatur secara adil dan setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan meskipun ia mengakui bahwa faktor ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh pendidikan. Sementara itu, Mead memandang bahwa pendidikan harus membantu individu untuk memahami diri mereka sendiri dan melihat bagaimana diri mereka dapat bergabung dengan masyarakat yang lebih luas. Dalam pandangannya, pendidikan harus merata bagi semua orang untuk mencapai tujuan ini. Louis Althusser di sisi lain berpendapat bahwa pendidikan seharusnya digunakan untuk menjaga kekuasaan elit dan mengontrol masyarakat. Oleh karena itu, ia tidak percaya pada pemerataan akses pendidikan dan lebih memperjuangkan pendidikan yang hanya tersedia bagi mereka yang mampu membayar. Lain halnya Ibnu Khaldun yang memandang bahwa sistem pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Ia percaya bahwa pemerataan akses pendidikan dapat membantu untuk mengembangkan potensi manusia dan meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Namun, ia juga mengakui bahwa sistem pendidikan tidak bisa sepenuhnya merata dalam kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda.

Meski demikian, ada persamaan perspektif dari Emile Durekheim, Max Weber, George Herbert Mead, Louis Althusser, dan Ibnu Khaldun tentang pemerataan akses pendidikan. Para ahli yang disebutkan memiliki persamaan persepsi bahwa pemerataan akses pendidikan adalah penting untuk mencapai keadilan sosial dan kemajuan umat manusia. Mereka mengakui bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih maju dan adil. Mereka juga sepakat bahwa pemerintah harus ikut serta dalam mendukung pemerataan akses pendidikan dengan mengimplementasi kebijakan yang tepat dan memberikan fasilitas yang memadai agar semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Selain itu, mereka juga mengakui bahwa pendidikan bukan hanya tentang penguasaan pengetahuan, tetapi juga berfungsi untuk membentuk karakter dan moral seseorang serta membantu individu untuk memahami peran mereka dalam masyarakat.

Dari berbagai pendapat dan teori serta implikasinya yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa pembuatan kebijakan dalam hal pemerataan akses pendidikan dapat dilakukan dalam beberapa cara, antara lain:

1. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan di daerah terpencil dan kurang berkembang, seperti dengan menyediakan transportasi gratis atau subsidi untuk murid-murid yang tinggal jauh dari sekolah.

2. Menjamin bahwa sekolah dan perguruan tinggi dengan kualitas tinggi lebih diperhatikan di daerah-daerah yang kurang berkembang, memberikan bantuan dana dan sumber daya pendidikan akan sangat membantu.
3. Program beasiswa dan bantuan keuangan yang lebih banyak dan beragam untuk siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat mengakses pendidikan yang berkualitas di sekolah atau perguruan tinggi (Cosentino dkk., 2019).
4. Meningkatkan akurasi dan kejelasan tingkat kelulusan, skor ujian, dan nilai yang diperlukan sebagai syarat untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan keuangan, agar lebih banyak siswa yang mampu memenuhi syarat dan mendapatkan akses ke pendidikan.
5. Melibatkan komunitas lokal dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam penyediaan pendidikan, seperti dengan melibatkan guru sukarelawan atau menyediakan pusat studi setelah sekolah untuk meningkatkan peluang pendidikan bagi siswa yang kurang mampu.
6. Meningkatkan kesadaran dan keberpihakan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dengan menggelar kampanye-kampanye yang dapat membujuk mereka untuk mendorong putra-putrinya untuk bersekolah.

Simpulan

Masalah ketimpangan pemerataan pendidikan di Indonesia seperti aksesibilitas pendidikan yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan ketimpangan dalam kesempatan belajar dan kualitas pendidikan. Ketimpangan seperti ini terlihat dalam kualitas pendidikan yang diberikan di berbagai daerah pedesaan. Ini menyebabkan perbedaan dalam mutu pendidikan dan peluang kesuksesan di masa depan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai pandangan sosiolog terkait isu pemerataan pendidikan tepatnya dengan menggunakan pendekatan Emile Durekheim, Max Weber, George Herbert Mead, Louis Althusser, dan Ibnu Khaldun. Penelitian ini adalah sebuah meta analisis terhadap permasalahan sosial dengan menggunakan pendekatan dari berbagai teori sosial.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Emile Durekheim, Max Weber, George Herbert Mead, Louis Althusser, dan Ibnu Khaldun memiliki teori sosial yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan pemerataan pendidikan. Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim memberikan gagasan bahwa akses pendidikan harus diberikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Menurut Durkheim, kesenjangan dalam pemerataan akses pendidikan dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakbersamaan dalam masyarakat. Lain halnya

dengan Max Weber, ia berpendapat bahwa tindakan sosial adalah hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya yang terbentuk oleh struktur sosial. Sehingga struktur sosial berperan penting dalam menentukan akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat. Di sisi lain, George Herbert Mead menjelaskan tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap perspektif individu. Misalnya, individu dari kelompok sosial yang kurang mampu cenderung menganggap pendidikan sebagai suatu yang tidak penting atau sulit dicapai karena terkendala akses dan biaya pendidikan yang tinggi. Sementara itu, individu dari kelompok sosial yang lebih mapan memiliki persepsi yang berbeda tentang pendidikan dan lebih mudah untuk mengaksesnya. Adapun Louis Althusser mengatakan bahwa ideologi yang dibangun oleh struktur sosial seperti kekuasaan, etnis, ekonomi, dan agama dapat mempengaruhi akses ke pendidikan. Misalnya, jika seseorang menganggap bahwa pendidikan hanya bisa dicapai oleh mereka yang memiliki uang banyak, maka ia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan karena faktor ekonomi. Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun dapat diaplikasikan bahwa kelompok yang solid dapat menjembatani kesenjangan pendidikan. Kelompok-kelompok yang terbentuk dari berbagai latar belakang, termasuk sosial dan ekonomi, dapat memungkinkan pertukaran pengalaman dan pengetahuan yang dapat meningkatkan akses pendidikan antara anggotanya. Misalnya, anak-anak yang berasal dari keluarga petani dapat belajar dari anak-anak dari keluarga tani yang lebih maju dan memiliki pengetahuan lebih tentang pertanian.

Daftar Rujukan

Althusser, L. (2015). *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara (Catatan-Catatan Investigasi)* (M. Z. Hussein & C. H. Pontoh, Ed.). IndoPROGRESS.

Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perpsektif pendidikan multikultural. *FOUNDASIA*, *13*(1). https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444

Arbangi, & Umiarso. (2022). *Interaksionisme Simbolik Transendental: Menuju ke Basis Teori Integralistik*. CV. Literasi Nusantara Abadi.

Arifal, M. (2020). Komunikasi Interaksi Simbolik Guru Dengan Siswa Kelas X Dalam Membangun Komunikasi Efektif Di SMKS YPPI Tualang. *Repository UIN Suska*, *3914*.

Arkorful, V. E., Basiru, I., Anokye, R., Latif, A., Agyei, E. K., Hammond, A., Pokuaah, S., Arkorful, E. V., & Abdul-Rahaman, S. (2019). Equitable Access and Inclusiveness in Basic Education: Roadblocks to Sustainable Development Goals.

https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1627554, *43*(3), 189–202. https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1627554

Blumer, H. (1966). Sociological Implications of the Thought of George Herbert Mead. *American Journal of Sociology*, *71*(5). https://doi.org/10.1086/224171

Coombs, J. R. (2006). Equal access to education: the ideal and the issues. *http://dx.doi.org/10.1080/0022027940260304*, *26*(3), 281–295. https://doi.org/10.1080/0022027940260304

Cosentino, C., Fortson, J., Liuzzi, S., Harris, A., & Blair, R. (2019). Can scholarships provide equitable access to high-quality university education? Evidence from the Mastercard Foundation Scholars Program. *International Journal of Educational Development*, *71*, 102089. https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2019.102089

Durkheim, E. (1922). *Education and Sociology*.

Durkheim, E. (1973). *On Morality and Society*. The University of Chicago Press.

Fauzi, A., Devi, H. M., & Susandi, A. (2022). Konsep Pendidikan Humanistik Perspektif Ibnu Khaldun. *JPDK: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, *4*.

Fauzi, E. C. A. (2022). PRESPEKTIF MAX WEBER : Analisis Motivasi Orang Tua Memilih Sekolah SDN Gampeng II Prespektif Max Weber. *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, *1*(3). https://doi.org/10.18860/ijpgmi.v1i3.2382

Ferretter, L. (2007). Louis althusser. Dalam *Louis Althusser*. https://doi.org/10.4324/9780203358726

Hakim, L. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *2*(1), 53–64. https://doi.org/10.30596/EDUTECH.V2I1.575

Hemalatha, M. (2019). Discourse and Context of Marginalism through Ideology and Ideological State Apparatus by Louis Althusser. *Language in India*, *19*(9).

Hikmah. (2017). Analisis Wacana; Interaksionisme Simbolik. *El-Hikam : Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, *10*(1).

Hulu, P. K., & Wahyuni, K. T. (2021). Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2010-2019. *Seminar Nasional Official Statistics*, *2021*(1). https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.979

Isa Anshori. (2016). Negara, Ideologi dan Pendidikan dalam pandangan Antonio Gramsci dan Louis Althusser. *Halaqa: Islamic Education Journal*.

Karmila, M., Syakira, N., & Mahir, M. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Mappesona*, *2*(1).

Khaidir, Nazaruddin, Nurainiah, Yalida, A., Siagin, N., Murni, Dahniar, Saepulloh, Akyuni, Q., Hawa, S., & Yusuf, M. (2022). *Sosiologi Pendidikan Islam* (N. Afra & N. Saputra, Ed.). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Khaldun, I. (2000). *Muqaddimah: An Introduction to The History of The World*. Pustaka Firdaus.

Komarudin. (2022). Pendidikan Perspektif Ibnu Khaldun. *PANDAWA: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, *4*(1).

Lubis, S. H. H., Pangaribuan, W., Ahmad, S. T., & Arif, S. (2022). Kebijakan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan dan Dampaknya terhadap Sekolah Swasta. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(5), 6172–6182. https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V7I5.7135

Martono, N. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. RajaGrafindo Persada.

Maula, I., irwandi, I., Sari, A. L., Sarimin, D. S., & Rondonuwu, R. H. S. (2023). Pendidikan untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak. *Journal on Education*, *5*(4), 13153–13165. https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2316

Muqsith, M. A. (2020). IPM dan Cita-Cita Pemerataan Pendidikan. *'ADALAH*, *4*(4). https://doi.org/10.15408/adalah.v4i4.17490

Nanggala, A. (2020). ANALISIS WACANA PEMBAHARUAN KEBIJAKAN ZONASI MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NADIEM MAKARIM SEBAGAI SOLUSI PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *8*(2), 46–56. https://doi.org/10.23887/JPKU.V8I2.24758

Nasution, I. Z. (2020). Pemikiran Pendidikan Ibnu Khaldun. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, *12*(1). https://doi.org/10.30596/intiqad.v12i1.4435

Nur 'Afifah. (2012). Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pendidikan. *Naskah Publikasi*.

Nurandriani, R., & Alghazal, S. (2022). Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*. https://doi.org/10.29313/jrpai.v2i1.731

Ottaway, A. K. C. (1955). The Educational Sociology of Emile Durkheim. *The British Journal of Sociology*, *6*(3), 213–227. https://doi.org/10.2307/586948

Prahesti, V. D. (2021). Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, *13*(2). https://doi.org/10.37252/annur.v13i2.123

Rahmawati, A. P. (2022). Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) Sebagai Sistem Penyebaran Guru Untuk Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Daerah 3T. *Social*,

Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series, *5*(2). https://doi.org/10.20961/shes.v5i2.59337

Romadona, M. T. (2020). Louis Althusser dan Filsafat Sebagai Yang Politis. *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, *5*(2).

Safarnaa, A. (2022). Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Agama (Relevansi Konsep Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Dengan Pendidikan Merdeka Belajar). *Jurnal Al-Fathan*, *1*(1).

Sari, S. N. (2021). Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pendidikan Islam Dalam Terjemahan Kitab Muqoddimah. *Skripsi*.

Setiyawan, R., & Budiman, A. (2019). Bergerak Dari Otoritarianisme Orde Baru ke Reformasi: Kuasa Negara Atas Pendidikan di Indonesia Dalam Perspektif Ideological State Apparatus (ISA) Louis Althusser. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, *19*(2).

Syafii, A. (2018). Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, *4*(2), 153–171. https://doi.org/10.26594/DIRASAT.V4I2.1535

Thalib, A. (2020). Geneologi dan Epistemologi Pemikiran Ibnu Khaldun. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, *14*(1), 116–130. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/16818

Virginia, P. (2022). Karakter Animasi Kecerdasan Emosional sebagai Media Komunikasi Interaksionisme Simbolik. *Jurnal Komunikasi Global*, *11*(1). https://doi.org/10.24815/jkg.v11i1.24717

Wajdi, Muh. B. N. (2015). Pendidikan Ideal Menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, *13*(2), 226–235.

Weber, M. (2013). *Economy and Society* (G. Roth & C. Wittich, Ed.). University of California Press.

Wijana, I. N., & Suhardi, M. (2018). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Anak Putus Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, *1*(1), 11–23. https://doi.org/10.31539/ALIGNMENT.V1I1.210

Yuliani, M. (2013). Ketimpangan Pendidikan di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *53*(9).

Yusdiana, E. (2018). EQUITY EQUALITY DAN SISTEM PENDANAAN PENDIDIKAN. *Jurnal As-Salam*, *2*(1). https://doi.org/10.37249/as-salam.v2i1.10

Zahirwan, M., Pisol, Yusri, M., & Imran, M. (2017). 5 Pandangan Ibnu Khaldun Berkaitan Kaedah Pendidikan Dalam Kitab Al-Muqaddimah. *Idealogy*, *2*(1).